

**PERANAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA
SUGA-SUGA HUTA GODANG KECAMATAN PASARIBU
TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

OLEH :

NENG SRIWATI MANALU

198520051



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**PERANAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA
SUGA-SUGA HUTAGODANG KECAMATAN PASARIBU
TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

NENG SRIWATI MANALU

198520051



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/9/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23


HALAMAN PENGESAHAN

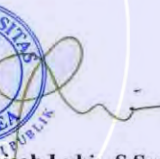
Judul : Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Membangun Infrastruktur Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan
Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah
Nama : Neng Sriwati Manalu
NPM : 19820051
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Marlina Deliana, S.AB, M.AB
Pembimbing II


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Ipol
Ketua Prodi

Tanggal Lulus : 12 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya yang dengan peraturan, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Neng Sriwati Manalu
Npm : 198520051
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya saya yang berjudul : "Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Infrastruktur Desa Suga-suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah".

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di :
Medan
Pada Tanggal:
28 Agustus 2023
Yang menyatakan

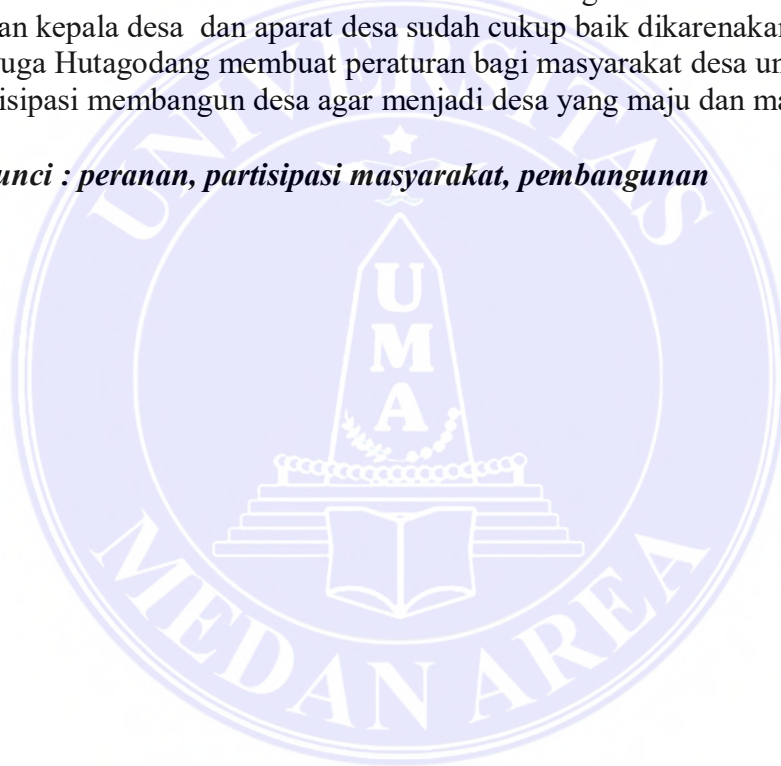


Neng sriwati Manalu
198520051

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Infrastruktur Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana peranan Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Suga-Suga Hutagodang kecamatan Pasaribu Tobing kabupaten tapanuli tengah, serta untuk meneliti faktor penghambat dalam Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Suhardono yang terdiri dari fasilitator, mobilisator, regulator dan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa indikator belum terlaksana dengan baik yaitu indikator fasilitator dan mobilisator sedangkan indikator regulator yang diberikan kepala desa dan aparat desa sudah cukup baik dikarenakan Kepala Desa Suga-Suga Hutagodang membuat peraturan bagi masyarakat desa untuk wajib ikut berpartisipasi membangun desa agar menjadi desa yang maju dan makmur.

Kata kunci : peranan, partisipasi masyarakat, pembangunan



Abstrack

This study aims to determine the Role of the Village Head in Increasing Community Participation in Building Infrastructure in the Village of Suga-Suga Hutagodang, Pasaribu Tobing District, Central Tapanuli Regency. This study was analyzed using Suhardono's theory which consisted of facilitators, mobilizers, regulators and was carried out using qualitative methods. This study concluded that the indicators facilitator and mobilizer provided by the village head officials were still not implemented properly, the regulator indicators given by the and village officials were good enough because the village head Suga -Suga Hutagodang made regulations for village communities to be obliged to participate in building the village so that it becomes an advanced and prosperous village.

Keywords: role, community participation, development



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di suga-suga hutagodang Pada tanggal 01, April 2002 dari ayah Suntriso Manalu dan ibu Esta Sagala. Penulis merupakan Putri Bapak Suntriso Manalu dari 4 bersaudara. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMA N 1 Sorkam Barat. dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi mahasiswa prodi Administrasi Publik pada tahun ajaran 2019 sampe pada tahun 2023

Penulis melaksanakan Penelitian di Kantor Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kasih karunia-Nya yang berlimpah karena penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat membangun Infrastruktur Desa Suga-Suga Huta Godang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah”**. yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Kaprodi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Indra Muda, MAP selaku Dosen pembimbing I saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB. selaku Dosen pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan memberikan waktu selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Fathin Abdullah, SH, M.Hum. selaku Sekretaris yang telah memberikan arahan dan motivasi
7. Seluruh dosen dan staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

8. Bapak Antonius Habeahan selaku kepala desa Suga-Suga Hutagodang yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini
10. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua yang saya cintai, yaitu Bapak Suntrisno Manalu dan Ibu Esta Sagala yang selalu mendoakan peneliti dalam mendukung setiap aktivitas, serta atas doa yang selalu mengiringi.
11. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran/kritik yang bersifat positif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi bermanfaat baik pendidikan dan masyarakat, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 28 Agustus 2023

Penulis

Neng Sriwati Manalu

198520051

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR BAGAN | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1. Manfaat Teoritis | 4 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Peranan..... | 5 |
| 2.2. Pemerintah Desa | 9 |
| 2.2.1. Pemerintah | 9 |
| 2.2.2. Pengertian Desa | 10 |
| 2.3. Peranan Pemerintah Desa | 12 |
| 2.3.1. Pembangunan | 12 |
| 2.3.2. Infrastruktur | 15 |
| 2.4. Partisipasi Masyarakat | 16 |
| 2.4.1. Partisipasi | 16 |
| 2.4.2. Masyarakat | 17 |
| 2.4.3. Partisipasi Masyarakat | 18 |
| 2.5. Kerangka Berpikir | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 2.6. Penelitian Terdahulu | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 27 |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| 3.3. Informan Penelitian | 28 |
| 3.4. Sumber Data | 30 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 3.6. Teknik Analisi Data | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 36 |
| 4.1. Hasil Penelitian | 36 |
| 4.2. Pembahasan Penelitian | 49 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1. Kesimpulan | 62 |
| 5.2. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |

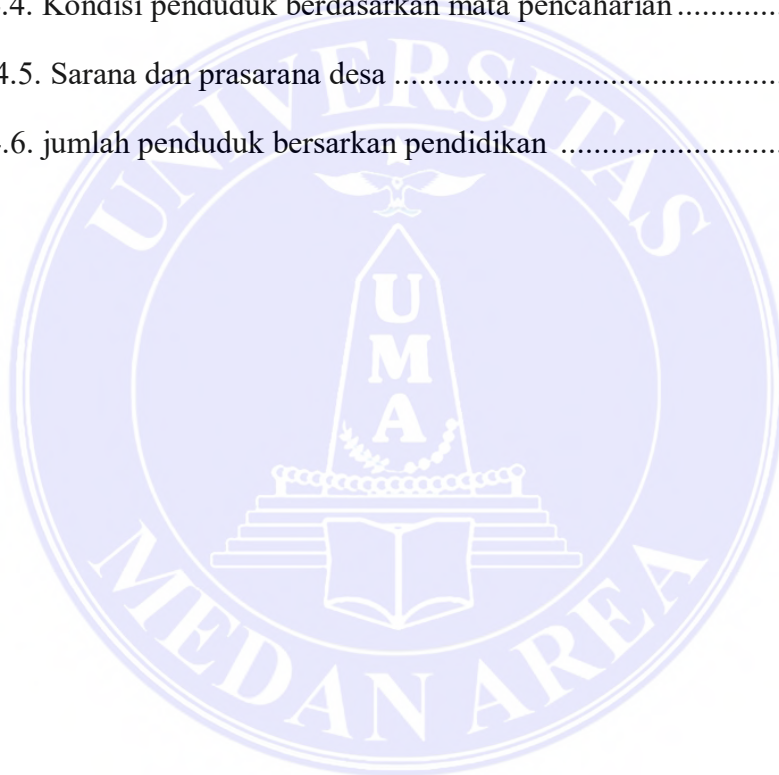
DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1. Kerangka Berpikir | 24 |
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Suga-Suga Hutagodang | 48 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu..... | 20 |
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian..... | 28 |
| Tabel 3.2. Informan Penelitian | 30 |
| Tabel 4.1.Tokoh Pemerintahan Desa | 37 |
| Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... | 38 |
| Tabel 4.3.Kondisi Penduduk berdasarkan Agama..... | 39 |
| Tabel 4.4. Kondisi penduduk berdasarkan mata pencaharian | 39 |
| Tabel 4.5. Sarana dan prasarana desa | 40 |
| Table 4.6. jumlah penduduk bersarkan pendidikan | 41 |



LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran I. Berita Wawancara..... | 68 |
| Lampiran II. Surat Menyurat..... | 71 |
| Lampiran III. Dokumentasi Penelitian..... | 77 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan Merupakan suatu konsep hubungan-hubungan sosial prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah desa memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pasal 17 Perbub Tapanuli Tengah No.1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagai penjabaran dari Visi dan Misi untuk masa 6 (enam) tahun. Kepala Desa bersama BPD menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”

Pada persiapan pembangunan maka diperlukan musrenbang desa untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan jangka menengah desa (RPJM Desa) yang sudah mengacu/memperhatikan kepada rencana pembangunan disusun. Musrenbang yang bermakna, akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa.

Partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, partisipasi berupa material, masyarakat desa Suga-Suga Hutagodang tidak sedikit yang ikut berpartisipasi salah satunya yaitu Bapak Esra Limbong selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi berupa material yaitu memberikan 200 meter dengan lebar 1.5 meter tanah miliknya untuk dijadikan pembangunan jalan rawa, sebagian lagi masyarakat memberikan berupa sumbangan dana sebesar Rp50.000/Rumah

tangga akan tetapi tidak semua masyarakat yang memberikan sumbangan dana tersebut. Kedua, Partisipasi non material seperti yang telah didata, masyarakat desa suga-suga hutagodang hanya sedikit ikut dalam musrenbang yang diadakan pemerintah desa, serta hanya sedikit yang ikut membantu membangun jalan tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah diamati oleh peneliti berdasarkan pra-penelitian terkait dengan kurangnya tanggung jawab terhadap peran Kepala Desa meningkatkan Partisipasi Masyarakat membangun belum menunjukkan peran yang baik terhadap masyarakat di desa suga-suga hutagodang. Serta terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi instansi yang akan melakukan kegiatan pembangunan kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi antar instansi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dalam hal ini penulis mengambil Judul ***“PERANAN KEPALA DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DESA SUGA-SUGA HUTA GODANG KECAMATAN PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Suga-Suga Hutagodang kecamatan Pasaribu Tobing kabupaten tapanuli tengah?
2. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam peranan Kepala Desa d meningkatkan partisipasi masyarakat membangun di desa suga-suga hutagodang?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti peranan Kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat desa suga-suga hutagodang kecamatan pasaribu tobing?
2. Untuk meneliti faktor hambatan dalam peranan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa suga-suga hutagodang ?

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Manajemen Sumber daya Manusia dan Evaluasi program kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh, serta

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Hutagodang tentang pentingnya Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat membangun Infrastruktur Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Menurut Suharimin (2018 : 76) menerangkan bahwa “Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas”.

Menurut Soekanto (2017: 243), peran merupakan “aspek dinamis kedudukan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila hak dan kewajiban telah dilakukan sesuai kedudukan”. Menurut Narwako dan Suryanto (2019: 160) mengatakan bahwa peran dapat dilihat dari tindakan seseorang dalam memberi arah dan proses sosialisasi, yang merupakan suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.

Menurut Rivai (2004: 148), menerangkan bahwa “peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu”. Ali (2000 : 148) menerangkan bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian

yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari polapola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Perilaku seseorang sangat diwarnai oleh banyak faktor, serta persepsinya tentang faktor-faktor tersebut. Persepsi yang dimiliki itu pulalah yang turut menentukan bentuk sifat dan intensitas peranannya dalam kehidupan organisasional. Tidak dapat disangkal pula, bahwa manusia sangat berbeda-beda, seseorang dengan lainnya, baik dalam arti kebutuhannya, bagi kategori umum, maupun dalam niatnya yang kesemuanya tercermin dalam kepribadian masing-masing.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka mutlak perlu bagi pimpinan organisasi untuk memahami dan mendalami persepsi bawahannya, baik yang menyangkut peranan bawahan tersebut dalam usaha pencapaian tujuan organisasi maupun mengenai berlangsungnya seluruh proses administrasi dan manajemen dalam organisasi yang bersangkutan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka akan dijalankan peranan. Menurut Levison dalam Soekanto (2017: 269) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga,
3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan.

Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran kepala desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, mobilisator, regulator sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

Menurut Siswanto dan Miftah Thoha(2012: 21 dan 12), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar Pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi,atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagaipenghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakanperincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan inidijelaskan sebagai berikut:

- a. Peranan Sebagai Tokoh (*Figurehead*),yaknisuatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- b. Peranan Sebagai Pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasanbertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan,mengendalikan.
- c. Peranan Sebagai Pejabat Perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf,dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini.

Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a. Peran Pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

- 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 2) Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
- 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatusasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
- 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

- b. Sebagai Diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya.
- c. Sebagai Juru Bicara (*Spokesman*),peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.

Setiap peranan memiliki tujuan untuk memiliki hubungan antara individu dengan orang-orang sekitarnya yang memiliki hubungan dengan peranannya tersebut, dan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak Soerjono Soekanto, (2002:243) Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat.

2.2. Pemerintah Desa

2.2.1. Pemerintah

Pemerintah secara etimologist ialah pemerintahan berasal dari kata dasar “Pemerintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando. Pemerintah dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin: *gubernare*, *greek*kybernaan yang berarti mengemudikan atau mengendalikan (Ibrahim, 2010: 87). Secara umum pemerintah merupakan

organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Sumaryadi (2010: 146), mengemukakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik.
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik.
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi menjalankan kekuasaan.

Menurut Syafiie, (2003:135), “pemerintah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.”

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

2.2.2. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul

dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Peraturan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

2.2.3. Peranan Pemerintah Desa

Suhardono (2016: 38) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan. Adapun peran pemerintah desa adalah:

1. Fasilitator adalah tindakan pemerintah desa dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.
2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.
3. Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembangunan)

2.3. Pembangunan Infrastruktur

2.3.1. Pembangunan

Pembangunan sejatinya bukanlah fenomena materi (fisik) semata, pembangunan harus melampaui sisi materi dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20) mengungkapkan pandangan bahwa “pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial,

sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.”

Senada dengan Todaro, Effendi (2002: 9) mendefinisikan “pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah.” Siagian (2012: 57-127) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan bahwa “bentuk-bentuk pembangunan bukan hanya fisik saja, namun mencakup hampir semua bidang diantaranya: politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.”

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif maka masyarakat juga perlu mempelajari sejarah-sejarah bangsa. Mengetahui sejarah adalah penting supaya kita tidak dapat mengulangi kesalahan-kesalahan dari bangsa lain dalam melakukan pembangunan dan memeliharanya.

Selain itu, pembangunan harus adil yaitu bagi manusia dan adil juga bagi alam, yang kelestariannya harus dipelihara. Disamping itu, keadaan manusia dan alamnya harus lebih baik karena arti pembangunan adalah menjadi lebih baik yang berkelanjutan (Afiffuddin, 2010: 42-49).

Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung, yang oleh Bung Karno disebut masyarakat gotong-royong. Menurut Charlotte Roberts, orientasi tersebut walaupun tidak mengesampingkan

kehendak pribadi, memberi pemahaman pribadi yang mendalam kepada seseorang bahwa ia adalah bagian dari masyarakat. Dengan demikian, karena merasa bagian dari masyarakat, maka seseorang tidak berhasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan orang lain, bukan karena ia bersimpati atau mengutamakan orang lain, melainkan karena mengakui bahwa nasib bangsa secara keseluruhan tak terelakkan, akan mempengaruhi nasibnya (Afiffuddin, 2010: 48).

Menurut Ndraha (1990: 16) Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama defenisi tersebut yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Peraturan Undang-undang No. 72 Tahun 2005 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa “Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.”

Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (*capacity*), tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampuan disini meliputi, fisik, mental, dan spritual. Segi-segi tersebut haruslah mengalami perubahan. Kedua, kebersamaan (*equity*) atau keadilan sosial. Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, kekuasaan (*empowerment*), hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan mereka dalam memberi respon terhadap perubahan. Keempat, ketahanan dan kemandirian (*sustainability*), implikasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin meningkat, maka sumber-sumber yang ada harus

dapat dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan mampu berkembang secara mandiri (Ndraha 1990:16).

2.3.2. Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Berdasarkan American Public Works Association (Stone, 1974), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan – pelayanan yang sama untuk memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

2.4. Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Partisipasi

Partisipasi Definisi yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan atau lembaga belum terdapat satu kesepakatan, sedangkan teori-teori yang dipergunakan pada umumnya langsung menyangkut kepada penerapannya atau aplikasinya.

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Didalamnya terdapat tiga unsur (gagasan) yang penting artinya bagi para pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan ketiga gagasan tersebut, yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Kesiediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
3. Tanggung jawab merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Diakui sebagai anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*” Secara etimologis, menurut Subekti (1984) partisipasi berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi. Sedangkan Marjono (1985) mengartikan partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi/kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki.

2.4.2. Masyarakat

Masyarakat mengandung pengertian suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang sangat luas sifatnya. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Saling mempengaruhi artinya pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya yang menjadi unsur yang harus ada bagi masyarakat. Masyarakat bukan berarti penjumlahan orang-orang saja, tetapi diantara mereka harus ada pertalian satu sama lainnya yang merupakan kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses dan menyebabkan perubahan dapat terjadi dalam kehidupan manusia .

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Kemudian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan. Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat.

2.4.3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-

faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal, Muhaimin (1987:132) mengemukakan bahwa teori partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam dua matra, yaitu : matra sosial dan matra modernitas. Pada matra ini terlihat nuansa partisipasi secara horizontal dan vertikal. Untuk matra sosial dikemukakan oleh muhaimin (1987:132), sebagai berikut:

1. Pola umum; Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah dan non pemerintah nyaris seimbang. Artinya ,bila terjadi kerjasama antara keduanya , yang terwujud adalah kegiatan semi-pemerintah, maka partisipasi dalam kegiatan tersebut cenderung meningkat
2. Pola dualistik; Partisipasi masyarakat dalam kegiatan non-pemerintah lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang disponsori pemerintah. Dengan perkataan lain, kegiatan yang dimotori non-pemerintahan lebih mampu menarik dukungan masyarakat daripada yang disponsori pemerintah.

Ditinjau dari aspek pendekatannya, Ramos dan Ramon (1980) menyatakan bahwa *topdown approach* kurang tepat digunakan. Sebaliknya ,*bottom-up approach* lebih sesuai karena lebih mengutamakan manajemen partisipasi. Kesesuaian pendekatan ini didasarkan atas kondisi aktual, dimana paket pelayanan perkotaan di indonesia kurang menjanjikan kelompok sosial ekonomi tertentu (*periveral*), sehingga kebutuhan dan masalah sebenarnya dalam

masyarakat kadangkala berbeda dengan yang ada dalam program pemerintah. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat berpaling pada organisasi sosial kemasyarakatan yang dianggap berhasil meng-identifikasi kebutuhannya.

Meskipun tiap model memiliki penekanan yang berbeda bahkan bila diperbandingkan sesama model saling tumpah-tindih, namun secara keseluruhan model tersebut berusaha mengemukakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk menjadi pedoman bagi penelitian ini yaitu :

| NO | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan Penelitian |
|----|---|-------------------|---|--|
| 1 | “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi Di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.” Jurnal Ilmu Pemerintahan. Oleh Nopiansyah,2019 | Kualitatif | Hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi desa masih belum optimal. Terdapat beberapa titik lemah seperti (1) kurangnya kepala desa dalam memantau perkembangan masyarakat, (2) kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung, (3) kurangnya sosialisasi dari instansi yang akan melakukan kegiatan | Keterkaitan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan tetapi perbedaanya juga terdapat pada tempat |

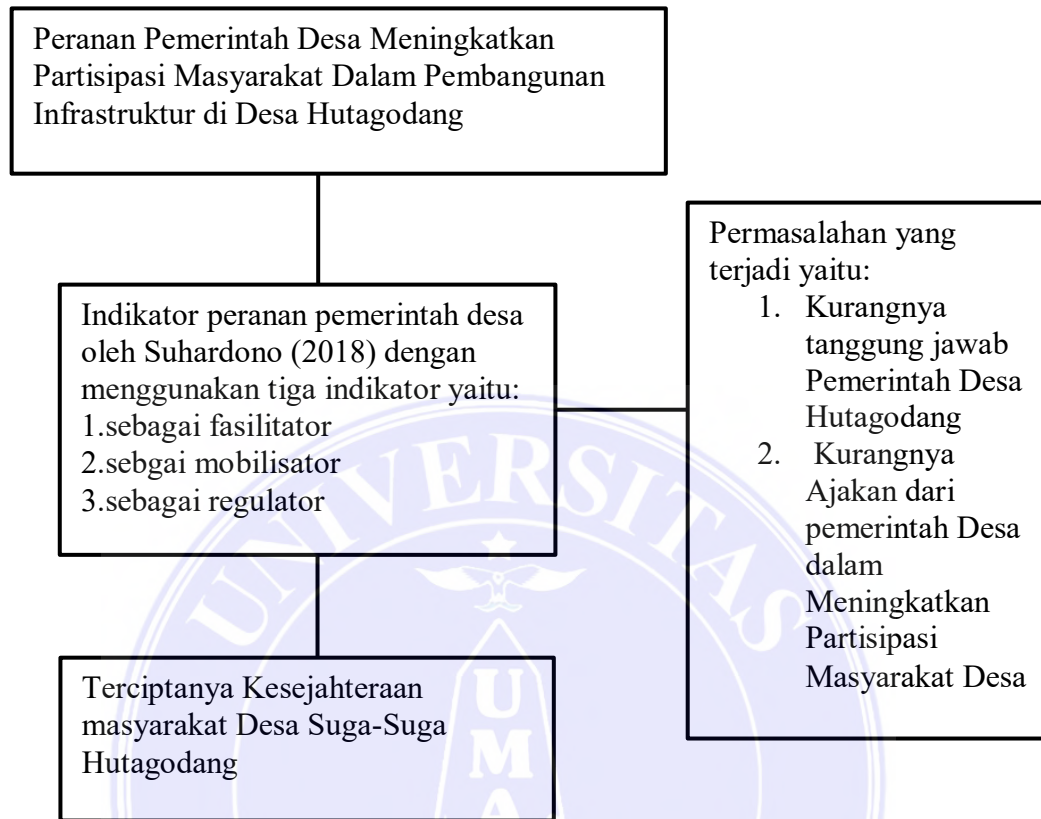
| | | | | |
|---|---|------------|--|--|
| | | | pembangunan kepada masyarakat, (4) kurangnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan dan kurangnya koordinasi antar instansi | penelitian sekarang dan terdahulu |
| 2 | “Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang” Jurnal Clean Government Mustanir,(2019) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparatur pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik dengan persentase 76%, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori baik dengan persentase 64%, dan persentase secara keseluruhan yaitu 76% | Berdasarkan Penelitian tersebut memiliki persamaan yang membahas tentang pasrtisipasi masyarakat dengan penelitian yang sekarang, yang membedakannya yaitu lokasi penelitian yang sekarang dan terdahulu |
| 3 | “Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo” | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peranan pemerintah desa didesa Dulamayo Utara sudah berjalan dengan baik yang meliputi : peranan sebagai inovator, | Perbedaannya pada penelitian lokasi penelitian yang sekarang. Rabia memilih lokasi penelitian |

| | | | | |
|---|--|------------|--|--|
| | Jurnal Administrasi Rabia Gani,(2016) | | peranan sebagai motivator, dan peranan sebagai fasilitator, 2) Faktor-faktor penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yakni faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa | di Desa Dulamayo kecamatan Telaga Biru |
| 4 | “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene)” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi Munawar Arifin,(2019) | Kualitatif | Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat merupakan faktor penunjang pembangunan di desa kurang baik jika dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Maliaya. | Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penunjang pembangunan sedangkan penelitian yang sekarang berfokus pada partisipasi masyarakatnya. Serta Perbedaan penelitian terdapat Pada lokasi yang berdeda, peneliti Munawar Arifin lokasi penelitiannya di Desa Maliaya. |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|---|--|
| 5 | <p>“Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Daerah Sesuai Dengan Uu No.6 Tahun 2014 Di Desa Karang Endah “</p> <p>Oleh Tama (2018).</p> | Kuantitatif | <p>Hasil analisis keempat teknik pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan rendahnya No.6 tahun 2014 di desa Karang. Endah bagus dengan persentase rata-rata 83,4%.</p> | <p>Perbedaanya Pada penelitian ini yaitu dari metode yang digunakan. Serta Lokasi Penelitian yang sekarang dan penelitian terdahulu.</p> |
|---|---|-------------|---|--|

Diolah: Peneliti 2023

2.6. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

sumber: Peneliti 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Sugiyono (2018:2) Mengatakan bahwa :

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan data dengan menggambarkan atau menguraikan data dengan kata-kata bukan dengan angka sesuai dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait dengan Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Infrastruktur Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan, sebelumnya harus menentukan lokasi tempat peneliti melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi penelitian di Kantor Kepala Desa Suga-Suga Hutagodang Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti tertarik akan permasalahan di desa suga-suga

hutagodang dikarenakan bagaimana cara peran kepala desa dalam mengajak partisipasi masyarakat untuk pembangunan belum berjalan dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Peranan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat membangun infrastruktur desa suga-suga hutagodang kecamatan pasaribu tobing kabupaten tapanuli tengah. Dimulai sejak bulan Desember 2022 sampai selesai.

Berikut proses kegiatan yang dilakukan dipaparkan dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Nov 2022 | Des 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | Mei 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 |
|----|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | | | | |
| 3. | Perbaikan Proposal | | | | | | | | | |
| 4. | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | |
| 5. | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | |
| 6. | Seminar Hasil | | | | | | | | | |
| 7. | Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | |
| 8. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | |

Sumber : peneliti 2023

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Adapun Informan yang akan dibahas secara langsung dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan “mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan “ dalam penelitian Suyanto (2005:172). Adapun Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Anton Pasaribu selaku kepala Desa Suga-Suga Hutagodang.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti Suyanto(2005: 172). Yang menjadi informan utama adalah Ibu Astina Br Simanihuruk selaku Sekretaris Desa Suga-Suga Hutagodang
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti Suyanto (2005: 172).Maka yang menjadi informan tambahan yaitu Bapak Jonnedis Habeahaan selaku kaur pemerintahan dan Bapak Topo Marbun,Bapak Lamhot Manalu, dan Ibu Santi Bondar Selaku Masyarakat Desa Suga-Suga Hutagodang

3.4.Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, dan observasi. Jumlah informan pada penelitian kualitatif tidak dipermasalahkan. Jumlah informan dapat diambil dengan jumlah sedikit ataupun banyak, tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci (*key informan*) dan kompleksitas serta fenomena sosial yang diteliti sampai berakhirnya pengumpulan informasi.

Data Primer dalam Penelitian ini yaitu Informan yang diperoleh dari Kepala Desa Suga-Suga Hutagodang, Perangkat Desa,serta Masyarakat Desa Hutagodang

2. Data Sekunder

Ruslan (2004:138) mengungkapkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga yang telah tersedia, yang berbentuk laporan ataupun catatan data dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari datadata, buku-buku referensi, arsip maupun dokumentasi tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan langkah utama sebelum melakukan proses analisis data interaktif. Idrus (2009:148) mengungkapkan bahwa “data kualitatif merupakan data berupa fenomena, kata-kata, foto, perilaku dan sikap sehari-hari yang didapatkan dari hasil observasi dengan menggunakan alat bantu berupa perekam suara, kamera, dan video.”

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah Triangulasi data. Triangulasi data merupakan gambaran data yang dikombinasikan dari

berbagai sumber dan dalam waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda dan berasal dari orang yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi adalah metode dimana informasi dikumpulkan dan perilaku di selidiki. Sugiyono (2018:229) menegaskan Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang memiliki ciri – ciri tertentu dibandingkan dengan metode lainnya. Hal-hal lain juga bisa di amati, selain orang. Observasi yang dilakukan di lapangan untuk melihat dan mempelajari kondisi sebenarnya di Desa Hutaodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur (*semistructure interview*). Peneliti sudah harus mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis namun tidak menyiapkan alternatif jawaban seperti halnya wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur berada di tengah-tengah yaitu penggabungan antara wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan suatu masalah agar lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ideidenya (Sugiyono, 2016: 233).

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis wawancara Semi Terstruktur, karena metode ini memungkinkan pertanyaan baru untuk mendapatkan informasi yang dilakukan lebih mendalam tentang peran pemerintah

desa dalam meningkatkan pembangunan desa Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berisi catatan-catatan kunci tentang masalah yang diteliti, dengan menggunakan data yang ada untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Dokumen tersebut dapat berupa gambar dan catatan dari lapangan yang dibuat oleh peneliti secara alami tentunya terkait dengan Peranan Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Proses analisis data penelitian ini, dapat dilakukan bersama dengan proses penumpulan data, diantaranya melalui tiga tahap yaitu :

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data” selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

Selain itu penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) “kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan”. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

4. Triangulasi

Triangulasi, menurut Sugiyono, (2015:83), mengemukakan bahwa triangulasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara menggabungkan sumber yang ada, dengan kata lain kita dapat melakukan observasi, wawancara kepada sumber yang berbeda yang memiliki cara pandang berbeda pula. Ibaratkan sebagai teknik pemeriksaan data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang telah kita lakukan.

Kepala Pemerintahan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa menjadi pelaksana tugas operasional pada bidang pemerintahan desa. Dalam melakukan tugasnya Kepala Pemerintahan memiliki fungsi:

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban desa.
- b. Melakukan manajemen pemerintahan desa.
- c. Melakukan penataan dan pengelolaan desa.
- d. Melakukan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Kasi Keuangan

Kepala Keuangan atau Bendahara Desa memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam keuangan. Dalam melakukan tugas Kepala Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pencatatan mengenai pengeluaran keuangan.
- b. Melaksanakan aktivitas administrasi.
- c. Merencanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD).Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.
- d. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa untuk perkembangan.

5. Kasi Umum

Bertugas untuk membantu Sekretaris Desa untuk urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan.

- b. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta menyelenggarakan penataan administrasi perangkat desa.
- c. Melaksanakan kegiatan mencatat mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan perundang-undangan.

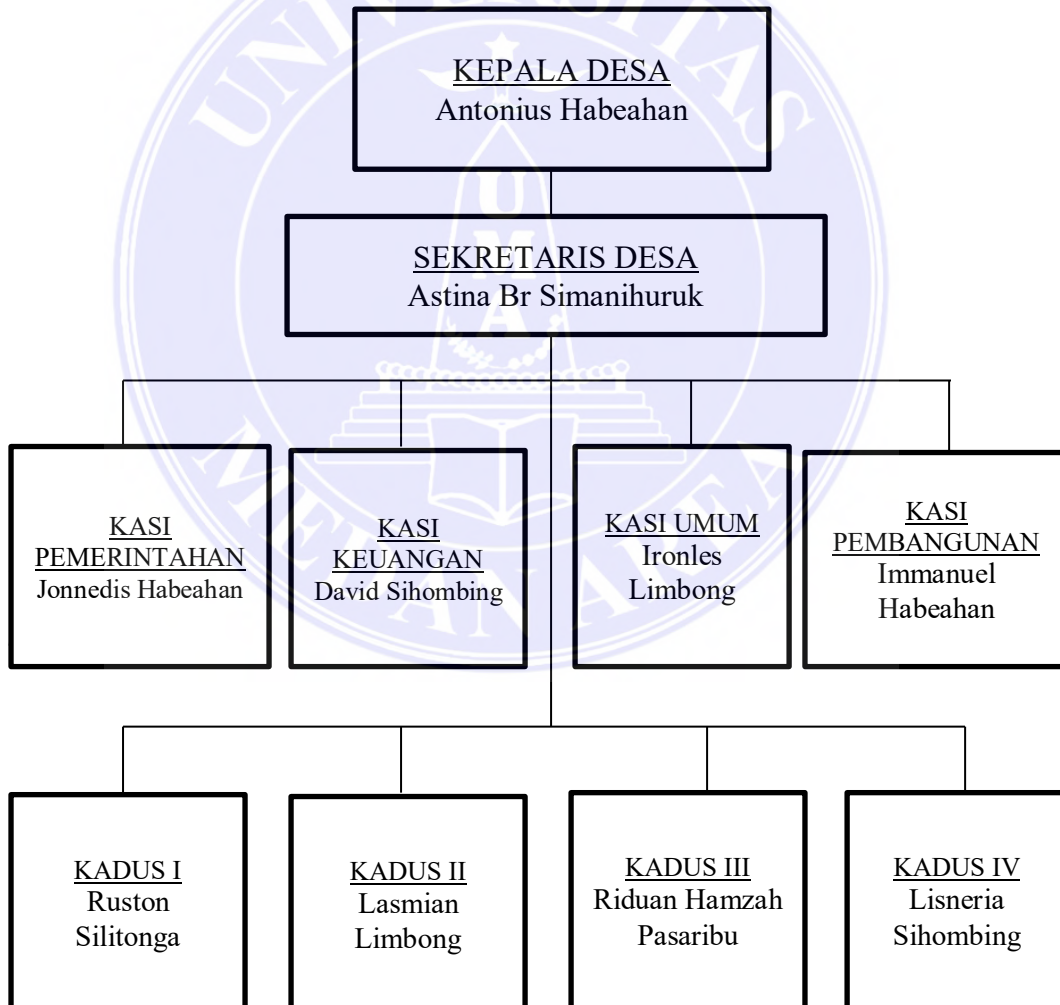
6. Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki tugas kedaerahan yang dapat membantu tugas Kepala Desa untuk pelaksanaan tugasnya di daerah. Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- b. Melakukan keputusan dan aturan kepala desa.
- c. Melakukan pembinaan dan meningkatkan swadaya serta peran masyarakat dan budaya gotong royong.
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- e. Melaksanakan pembinaan dan ketertiban masyarakat.
- f. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- g. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan konflik antar anggota masyarakat.
- h. Melaksanakan pendataan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di wilayahnya.
- i. Menyosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan masyarakat.
- j. Menyosialisasikan program-program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- k. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang - undangan;

- l. Melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suga-Suga Hutagodang Tahun 2022



Sumber : Kantor Kepala Desa Suga-suga Hutagodang Tahun 2023

4.2. Pembahasan Penelitian

1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator, bahwa pemerintah desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan, sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan. Fasilitator juga dapat di katakan sebagai seorang melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

Peran pemerintah desa suga-suga hutagodang dalam pembangunan desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan kunci bapak Antonius Habeahan selaku kepala desa suga-suga hutagodang menyatakan bahwa:

“hal yang pertama yang kami lakukan sebagai aparat desa suga-suga hutagodang yaitu pertama terlebih dahulu mendengarkan keluhan masyarakat, yang kedua usulan apa saja yang udah disampaikan masyarakat lalu kita tampung semua, usulan masyarakat tentang pembangunan yang melibatkan masyarakat kami dengarkan, lalu nantinya bakalan tentukan skala prioritasnya yang akan kami cari bersama solusinya”. (Wawancara pada tanggal 17 maret 2023, pukul 12 : 25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan inti fasilitator Pemerintah Desa Suga-Suga Hutagodang membenarkan bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan setiap unsur masyarakat dilibatkan. Semua usulan yang masuk diterima kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dahulu. Program pembangunan sekarang berbeda dengan program pembangunan terdahulu. Dahulu memang yang menentukan arah pembangunan adalah pemerintah sedangkan masyarakat hanya diam dan tinggal merasakan hasilnya atau dengan kata lain bersifat *top-down*. Namun sekarang masyarakat sendiri yang merencanakan pembangunan, sementara Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinir kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Astina Br Simanihuruk selaku sekretaris desa Suga-Suga Hutagodang menyatakan bahwa :

“pembangunan dulu sudah berbeda dengan program pembangunan sekarang, dulu memang masyarakatnya hanya tinggal menikmati hasil pembangunan dari pemerintah, apa-apa semua pemerintah yang menangani masalah pembangunan yang ada di desa ini, tapi sekarang sudah beda masyarakatlah yang mengusulkan pembangunan kepada pemerintah semenjak adanya dana desa, ya tugasnya pemerintah tinggal mengkoordinir serta memfasilitasi apa yang diperlukan masyarakat itu.”. (Wawancara pada tanggal 17 maret 2023 pukul 15 : 19 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama dapat diketahui bahwa selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk memfasilitasi keperluan yang akan digunakan nantinya untuk melaksanakan pembangunan. Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintahan Desa sebagai Fasilitator menjalankan perannya sebagai pelatih, bimbingan, nasehat dan pendapat. Kemudian peneliti melakukan wawancara

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

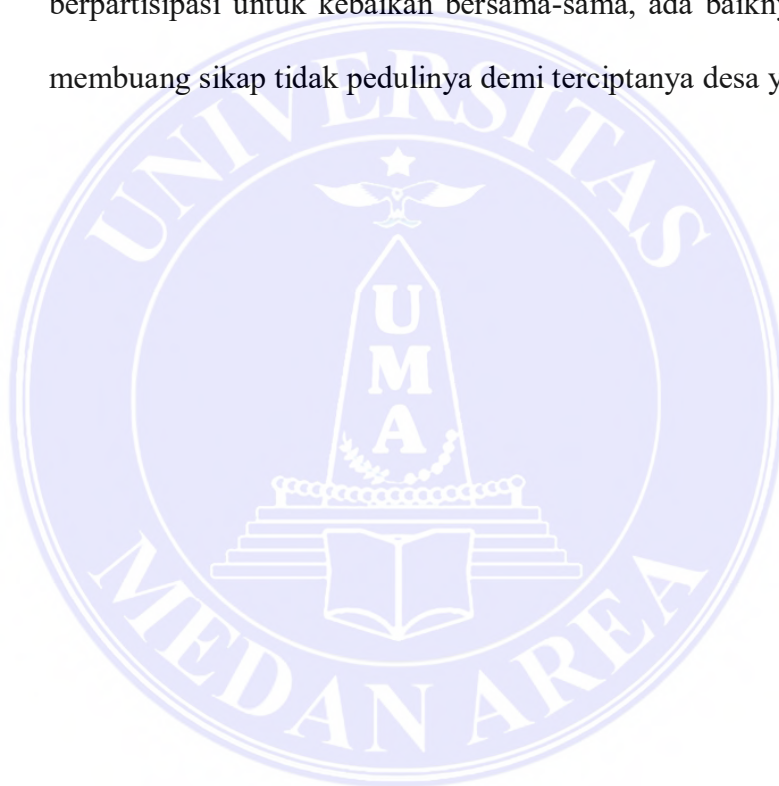
Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa suga-suga hutagodang kecamatan pasaribu tobing kabupaten tapanuli tengah, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu :

1. Peranan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Psaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah ada tiga indikator yaitu indikator fasilitator, mobilisator, regulator. Indikator yang dimana belum terlaksana dengan baik yaitu fasilitator dan mobilisator, sedangkan regulator sudah cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai kepala desa dan aparat desa.
2. Faktor Penghambat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan aspirasinya, Masyarakat kurang mendukung dan terkesan pasif, apatis dalam kegiatan pembangunan karena masyarakat beranggapan bahwa pembangunan hanya tanggung jawab Pemerintah Desa

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat membangun infrastruktur desa suga-suga hutagodang kecamatan pasaribu tobing kabupaten tapanuli tengah, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah desa didalam menggerakkan masyarakat diharapkan harus lebih berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Oleh karena itu pemerintah desa harus memperhatikan kekurangan agar dapat meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat untuk ikut beraspirasi.
2. Masyarakat juga sebaiknya harus lebih peduli lagi dalam ikut berpartisipasi untuk kebaikan bersama-sama, ada baiknya masyarakat membuang sikap tidak pedulinya demi terciptanya desa yang sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adisasmita,(2006). *Pembangunan desa dan kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Affuddin.(2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ali, (2000). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa
- Widjaja.AW (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto.(2005). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta.
- Effendi. (2002). *Hal Utama dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Idrus.(2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja.
- Muhaimin.(1987). *Menatap Masalah Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Grafitakama Offset.
- Ndrara. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmodjo.(1993). *Pengantar Pendidikan dan Pendidikan Kesehatan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Rivai, (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori kepraktik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ruslan. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo
- Siagian.P.Sondang.(2012). *Administrasi Pembangunan,Konsep,Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Gramedia.
- Soekanto, (2002). *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara,)
- Suhardono.E.(2016). *Teori Peran ,Konsep dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Remaja.
- _____.(2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- Syafiee.(2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Fefita Aditama
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

JURNAL :

- Arifin, M. (2019). *Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene)*. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2(1).
- Mustanir.(2019). *Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di*

Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Clean Government, 2(1), 67-84.

Nopiansyah.(2019). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi Di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 184-206.*

Rabia Gani. (2016). “ *Peranan pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan*“ *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.5,no,1.:* 60-68

Suharimin.(2018).*Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. JISIP:Jurnal Ilmu Social Politik,8(9),87-89*

Tama, A. W.(2018). *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)*

PERATURAN UNDANG-UNDANG:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perencanaan dan Pembangunan

LAMPIRAN

Lampiran I Berita Wawancara

Peranan Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Tapanuli Tengah

Wawancara ini dilakukan berdasarkan teori peran menurut suhardono (1994) yang memiliki 3 (tiga) indicator pengukuran, antara lain :

1. Fasilitator
2. Mobilisator
3. Regulator

Narasumber dari Desa Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah :

1) Fasilitator

A. Kepala Desa Sebagai Fasilitator

1. Apakah Pemerintah Desa Menyediakan Tempat Untuk Melakukan Musrebang Kepada Masyarakat Hutagodang?
2. Apakah Fasilitas-fasilitas sudah disediakan kepada masyarakat Setiap melakukan musrenbang desa?
3. Setelah Musrenbang telah disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa, apakah pemerintah desa juga telah menyediakan sarana dan prasana untuk melaksanakan pembangunan tersebut?
4. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa Hutagodang tentang pembangunan infrastruktur di desa hutagodang?

B. Masyarakat sebagai Fasilitator

1. Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu tentang tempat yang telah disediakan dalam melakukan musrebang desa hutagodang?
2. Apakah masyarakat merasakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan pemerintah desa selama musrenbang berlangsung?

3. Apakah prasarana dan sarana telah dirasakan masyarakat selama pembangunan yang dilakukan ?
- 2) Mobilisator
- A. Kepala Desa sebagai Mobilisator
1. Bagaimana Cara Kepala Desa mendorong partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di desa hutagodang ?
 2. Bagaimana Peran Kepala desa dalam mengerakkan keikutsertaan masyarakat agar berpartisipasi untuk ikut dalam pembangunan yang dilakukan ?
 3. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan t?
 4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam berkomunikasi yang jelas kepada masyarakat?
 5. Bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di desa hutagodang kecamatan Pasaribu Tobing kabupaten Tapanuli tengah?
 6. Apa strategi pemerintah desa dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di desa hutagodang ?
- B. Masyarakat sebagai Mobilisator
1. Usaha kepala desa untuk mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan seperti apa ?
 2. Apakah masyarakat sudah dilibatkan dalam proses pembangunan yang telah dilakukan ?
 3. Apakah masyarakat telah menerima informasi tentang sosialisasi program pembangunan ?
 4. Apakah masyarakat telah menjalin komunikasi yang baik dan jelas kepada pemerintah desa ?
 5. Bagaimana Tanggapan Bapak/ibu tentang partisipasi yang telah diberikan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di desa hutagodang?

6. Apakah strategi yang diberikan pemerintah desa telah membuat masyarakat ikut berpartisipasi?

3) Regulator

A. Kepala Desa sebagai Regulator


1. Apakah ada peraturan yang telah dibuat pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di desa hutagodang ?
2. Apakah pemerintah desa ada memberikan sanksi yang dibuat bagi masyarakat yang tidak ikut serta berpartisipasi?
3. Mengapa peran pemerintah sebagai regulator sangat penting terutama dalam hal proses pembangunan infrastruktur?
4. Apakah pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengetahui segala kegiatan yang dilakukan pada pembangunan ?

B. Masyarakat Sebagai Regulator

1. Bagaimana Tanggapan Bapak/ibu terhadap peraturan yang dibuat pemerintah desa kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Hutagodang?
2. Apakah Masyarakat Mengetahui pemberian sanksi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi?
3. Apakah Pemerintah Desa melibatkan Masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan ?

LAMPIRAN II Surat Menyurat

a. Surat mengambil riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1515/FIS.2/01.10/II/2023 28 Februari 2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Kepala Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama : Neng Sriwati Manalu
N P M : 198520051
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan judul Skripsi "Peranan Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area


Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Elras Juliana Hasibuan, M.Si

CC: File,-

b. Surat Keterangan Selesai Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**
KECAMATAN PASARIBU TOBING
DESA SUGA-SUGA HUTAGODANG
Alamat : Jl. Sorkam-Simargarap Dusun IV Kode Pos: 22563

Suga-suga, 20 Maret 2023

Nomor : 037/TSP/2001/III/2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth.
Ibu Dekan Mahasiswa
Universitas Medan Area (UMA)
Di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

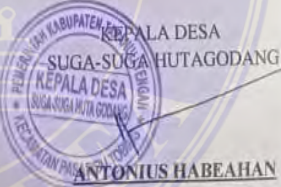
Nama : ANTONIUS HABEAHAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Suga-suga Hutagodang

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : NENG SRIWATI MANALU
Npm : 198520051
Program Studi : Administrasi Publik

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Suga-suga Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 01 Maret 2023 s/d 18 Maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :
"PERANAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUGA-SUGA HUTAGODANG KECAMATAN PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.


ANTONIUS HABEAHAN

C. Surat Kerangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Antonius Habeahan
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Suga - Suga Hutagodang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini.

Nama : Neng sriwati Manalu
NPM : 198520051
Prodi : Administrasi Publik
Alamat : Desa Suga-Suga Hutagodang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi yang berjudul
"peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Suga-Suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah"

Demikian keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suga - Suga Hutagodang, 17 Maret 2023

Yang membuat Pertanyaan



5.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jonnedis Habebahan
Jabatan : kasi Pemerintahan
Alamat : Desa Suga-suga Hutagodang Kecamatan Pasaribu Tobing

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini.


Nama : NENG SRIWATI MANALU
NPM : 198520051
Prodi : Administrasi Publik
Alamat : Jalan Sorkam-Simargarap

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi yang berjudul "*peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Huta Godang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah*"

Demikian keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suga-suga Hutagodang, 14 Maret 2023

Yang membuat Pertanyaan


(Jonnedis Habebahan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astina Br. Simanihuruk
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Desa Suga-Suga Hutagodang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini.

Nama : Neng sriwati Manalu
NPM : 198520051
Prodi : Administrasi Publik
Alamat : Desa Suga-Suga Hutagodang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi yang berjudul
"peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Suga-Suga HutaGodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah"

Demikian keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suga-suga Hutagodang, 14 Maret 2023
Yang membuat Pertanyaan

(Astina Br. simanihuruk)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lamhot Manalu

Jabatan : Masyarakat

Alamat : Desa Suga -Suga Hutagodang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini.

Nama : Neng sriwati Manalu

NPM : 198520051

Prodi : Administrasi Publik

Alamat : Desa Suga-Suga Hutagodang


Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian Skripsi yang berjudul

"peranan pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Suga-Suga HutaGodang Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah"

Demikian keterangan ini diberikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suga-SugaHutagodang, 18 Maret 2023

Yang membuat Pertanyaan


(Lamhot Manalu)

LAMPIRAN III Dokumentasi penelitian



Gambar 1. Dokumentasi peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Antonius Habeahan selaku kepala desa suga-suga Hutagodang



Gambar 2. Dokumentasi peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Jonnedis Habeahan selaku kaur pemerintahan desa suga-suga Hutagodang



Gambar 3 .Dokumentasi peneliti melakukan wawancara dengan ibu astina br simanihuruk selaku sekretaris desa suga-suga hutagodang



Gambar 4. Dokumentasi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak lamhot manalu selaku masyarakat desa suga-suga hutagodang



Gambar 5. Dokumentasi peneliti melakukan wawancara dengan bapak topo marbun selaku masyarakat suga-suga hutagodang



Gambar 6. Dokumentasi peneliti melakukan wawancara dengan ibu santi brondar selaku masyarakat desa suga-suga hutagodang